



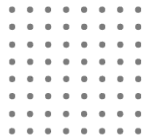
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BLORA  
MENURUT PENGELUARAN**

**2018-2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**





# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BLORA MENURUT PENGELUARAN**

## **2018-2022**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BLORA  
MENURUT PENGELUARAN 2018 - 2022**

ISSN : 2774-7530  
Nomor Publikasi : 33160.2308  
Katalog : 9302023.3316

Ukuran Buku : 17,7 cm x 24,9 cm  
Jumlah Halaman : vi + 70 halaman

Naskah  
BPS Kabupaten Blora

Penyunting  
BPS Kabupaten Blora

Desain cover oleh  
BPS Kabupaten Blora

Penerbit  
BPS Kabupaten Blora

Pencetak  
Selecta Grafika Blora

Sumber Ilustrasi  
canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.

## **TIM PENYUSUN**

**Penanggungjawab Umum/*General in Charge:***

Nurul Choiriyati, S.ST, MM

**Penyunting/*Editor:***

Dewi Setyowati, S.ST, MS

**Penulis/*Writer:***

Nia Aprillyana, S.ST, M.Si

**Pengolah Data/*Data Processor:***

Dewi Setyowati, S.ST, MS

**Gambar Kulit & Infografis/*Cover Design & Infographics:***

Nia Aprillyana, S.ST, M.Si

<https://bimabooks.go.id>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan dan ijin-Nya, penyusunan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran 2018-2022 dapat diselesaikan. Publikasi ini melengkapi publikasi PDRB yang sudah ada yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha yang melihat dari sisi produksi, sedangkan publikasi PDRB Menurut Pengeluaran menggambarkan sisi belanja atau pengeluaran, yaitu pengeluaran rumah tangga dan pemerintah, pembentukan modal dan ekspor neto.

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) meliputi beberapa komponen, yaitu komponen konsumsi, komponen investasi, dan ekspor neto dalam series lima tahun. PDRB Pengeluaran memberikan gambaran, bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi atau perdagangan ke luar daerah/negeri.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak untuk pengembangan ekonomi Blora. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi ini dimasa mendatang.

Blora, April 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA



NURUL CHOIRIYATI, S.ST., MM

<https://blorakab.bps.go.id>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	v
LAMPIRAN TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Manfaat.....	6
BAB II METODOLOGI PENYUSUNAN.....	11
2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi.....	12
2.2 Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional.....	16
2.3 Klasifikasi Kegiatan.....	19
2.4 Konsep Secara Umum.....	21
2.5 Komponen PDRB Menurut Pengeluaran.....	26
BAB III ULASAN.....	41
3.1 Selayang Pandang Perekonomian Global.....	41
3.2 Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran.....	42
3.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	48
3.4 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	53
3.5 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	55
3.6 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	56
3.7 Ekspor Neto.....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rp).....	45
Tabel 3.2	Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rp).....	46
Tabel 3.3	Distribusi Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (persen).....	47
Tabel 3.4	Pertumbuhan Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (persen).....	48
Tabel 3.5	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rp) .....	49
Tabel 3.6	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh Konstan Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rp) .....	50
Tabel 3.7	Distribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (persen)	51
Tabel 3.8	Pertumbuhan Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adh Konstan Tahun 2018 – 2022 (persen).....	52
Tabel 3.9	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Tahun 2018 – 2022.....	54
Tabel 3.10	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2018 – 2022.....	56
Tabel 3.11	Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2018 – 2022.....	58
Tabel 3.12	Ekspor Neto Tahun 2018 – 2022.....	62

## DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik 2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi Tertutup.....	14
Grafik 2.2 Siklus Transaksi Ekonomi Terbuka.....	15
Gambar 2.3 Arus Pendapatan Faktor Regional.....	17

<https://blorakab.bps.go.id>

## LAMPIRAN TABEL

Tabel 1.	PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah) .....	64
Tabel 2.	PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah) .....	65
Tabel 3.	Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Persen) .....	66
Tabel 4.	Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Persen) .....	67
Tabel 5.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Persen) .....	68
Tabel 6.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Persen) .....	69
Tabel 7.	Pertumbuhan Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (Persen) .....	70



# PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran ADH Berlaku Tahun 2022



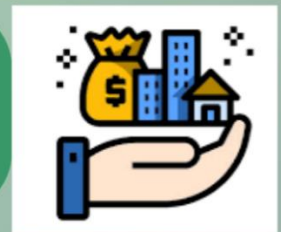
Konsumsi Rumah Tangga  
19.521.811,85 Juta

Konsumsi LNPR  
437.547,40 Juta



Konsumsi Pemerintah  
2.229.048,39 Juta

Pembentukan Modal  
Tetap Bruto  
3.493.491,51 Juta





# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor ekonomi atau unit usaha yang ada di suatu wilayah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

#### 1. Pendekatan Produksi,

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/region dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,

5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
8. Transporasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

## **2. Pendekatan Pendapatan,**

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/region dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

## **3. Pendekatan Pengeluaran,**

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah jumlah dari semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga,
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga,
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah,
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto,
5. Perubahan inventori, dan
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).



Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama.

Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.

Dari ketiga komponen tersebut, hingga saat ini komponen konsumsi memegang kontribusi terbesar. Komponen ini terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah. Dari ketiga item komponen konsumsi, konsumsi rumah tangga masih cukup dominan. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pada komponen Konsumsi maupun *share* dalam PDB/PDRB menurut Pengeluaran, maka ketika permintaan akan konsumsi rumah tangga berubah sedikit saja, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Blora, di level Jawa Tengah maupun Nasional kondisinya juga demikian.

## 1.2. Tujuan

Publikasi ini menampilkan hasil penghitungan PDRB dari sisi pengeluaran berikut analisa sederhananya. Diharapkan publikasi ini dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai kondisi perekonomian Blora dilihat dari sisi pengeluaran. Indikator-indikator dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mengkaji, mengevaluasi dan menyusun strategi kebijakan pembangunan.

Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran dapat memberikan gambaran fenomena ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, dan investasi yang merupakan bagian dari pembentukan modal tetap dan inventori. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak atau wilayah lain. PDRB perkapita yang disajikan juga dapat memberikan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum.

### 1.3. Manfaat

Indikator PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Blora 2018-2022 sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah pada umumnya dan pengambil kebijakan pada khususnya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, antara lain:

1. Mengetahui pola konsumsi makanan dan non makanan masyarakat/rumah tangga, konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT.
2. Mengetahui pola investasi.
3. Mengetahui surplus atau defisitnya neraca perdagangan Kabupaten Blora.

Dengan demikian pemerintah punya dasar/pijakan yang kuat dalam membuat perencanaan pembangunan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung agar proporsi pola konsumsi, pola investasi dan neraca perdagangan lebih berimbang sehingga mampu menggerakkan percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora. Manfaat dari indikator yang disajikan dalam publikasi ini antara lain :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/region. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap komponen, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/region. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/region.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah

<https://blorakab.bps.go.id>

<https://blorakab.bps.go.id>



# PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran ADH Konstan (2010=100) Tahun 2022



Konsumsi Rumah Tangga  
12.583.584,85 Juta

Konsumsi LNPRT  
245.977,59 Juta



Konsumsi Pemerintah  
1.391.224,93 Juta

Pembentukan Modal  
Tetap Bruto  
2.273.466,44 Juta



<https://blorakab.bps.go.id>

## **Bab II**

# **METODOLOGI PENYUSUNAN**

Aktivitas yang terjadi dalam masyarakat secara umum didasarkan pada dua motivasi pokok yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Kedua motif tersebut akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada arus ekonomi. Interaksi maupun transaksi yang terjadi dalam masyarakat terutama yang dilakukan pelaku ekonomi baik berbentuk tindakan produksi, konsumsi maupun akumulasi (investasi) akan membentuk suatu proses ekonomi yang panjang dan berkaitan.

Interaksi dalam masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian besar masyarakat. Permintaan akan produk-produk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan lebih banyak dan lebih bervariasi. Hal ini tentu akan direspon para produsen dengan meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Para produsen akan mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi barang dan jasa dengan meningkatkan teknologi produksinya. Proses peningkatan produksi barang dan jasa inilah yang disebut sebagai proses pembangunan ekonomi.

Komponen pengeluaran menjadi penyumbang terbesar pada PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Blora. Dan sampai saat ini komponen pengeluaran masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. J.M Keynes mengungkapkan bahwa besar kecilnya konsumsi pada suatu waktu ditentukan oleh nilai absolute dari pendapatan masyarakat yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*) pada waktu berlangsung. Pola tingkah laku konsumsi masyarakat meningkat sejalan dengan

pertambahan nilai pendapatan. James Duesenberry mendasarkan kepada anggapan utama atau asumsi sebagai berikut:

- 1) Tingkat konsumsi adalah interdependent terhadap tingkat pendapatan tinggi atau kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Disamping itu unsur status sosial seseorang juga turut menentukan tingkat konsumsinya. Dengan demikian tingkat pendapatan yang akan mempengaruhi konsumsi adalah nilai pendapatan relatif terhadap tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dimiliki sebelumnya.
- 2) Tingkat konsumsi bersifat *irreversible* yang bermakna bahwa apa yang terjadi pada waktu pendapatan naik, tidak akan selalu merupakan kebalikan bila terjadi penurunan pendapatan.

## 2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi

Konsep ekonomi klasik secara sederhana menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (makro) yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan menjadi dua kelompok pelaku utama yaitu produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok konsumen bagi kepentingan proses produksinya dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, atau lazimnya disebut sebagai output.

Di sisi lain kelompok konsumen memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi berupa tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*) dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang digunakan oleh produsen sebagai input untuk mendukung kegiatan proses produksinya. Sebagai kompensasinya, konsumen akan menerima balas jasa dari produsen berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal, dividen serta bentuk keuntungan lainnya. Balas jasa yang diterima oleh konsumen ini merupakan sumber pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pada sisi yang berbeda, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi akan dibeli kembali oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan



hidupnya. Hubungan antara penyediaan produk di satu sisi serta Pengeluaran (permintaan) di sisi lainnya ini disebut sebagai titik keseimbangan umum (*general equilibrium*) antara *Supply* dan *Demand*. Bahkan interaksi yang terjadi antara kedua kelompok besar pelaku ekonomi ini terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan membentuk suatu siklus perekonomian.

Pada proses ini produsen berfungsi sebagai penghasil produk, sedangkan konsumen sebagai pemakai produk akhir. Dari siklus makro tersebut dapat dilihat gambaran tentang struktur ekonomi serta perubahan-perubahan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi maupun beberapa data agregat lainnya.

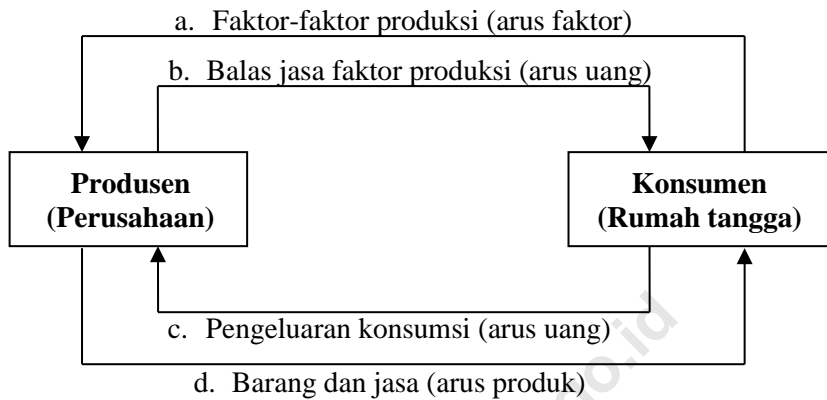
Pada sisi lain ada peran pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi suatu wilayah. Peran utama pemerintah tersebut adalah sebagai regulator, fasilitator maupun stabilitator antara pihak produsen dengan konsumen dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Untuk melihat siklus (perputaran) sistem perekonomian suatu wilayah atau negara secara sederhana adalah dengan menggunakan model **perekonomian tertutup** di mana diasumsikan tidak ada transaksi ekonomi antara wilayah tersebut dengan wilayah/negara lain (seperti halnya transaksi ekspor dan impor). Wilayah yang menganut sistem ekonomi tertutup tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh negara lain, begitu juga sebaliknya, negara lain juga tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Gambar 2.1 berikut menunjukkan hubungan transaksi dalam perekonomian tertutup.

Berdasarkan siklus makro, secara sederhana dapat dijelaskan beberapa arus transaksi yang terjadi antara produsen dengan konsumen sebagaimana berikut ini:

- a. arus penyediaan faktor produksi yang terdiri dari unsur tanah, tenaga kerja, kapital, kewirausahaan;
- b. arus balas jasa faktor produksi atau pendapatan yang terdiri atas unsur sewa tanah, upah dan gaji, bunga, deviden, serta keuntungan;
- c. arus pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi;
- d. arus barang dan jasa yang menjadi konsumsi.

**Gambar 2.1. Siklus Kegiatan Ekonomi Tertutup**



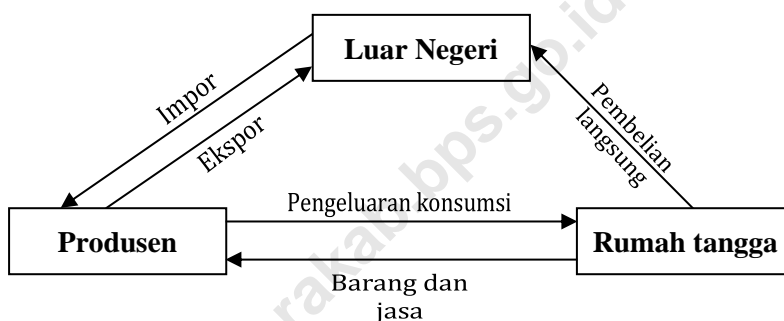
Gambar 2.1. menunjukkan adanya hubungan secara langsung antara arus produk dengan arus uang (moneter). Apabila seluruh transaksi dikonversikan kedalam satu satuan moneter (rupiah) maka keempat alur transaksi tersebut akan memberikan besaran nilai yang sama. Aliran faktor produksi dari rumah tangga ke produsen akan menyebabkan terjadinya arus balik dari produsen ke rumah tangga dalam bentuk pendapatan atau yang disebut sebagai balas jasa faktor produksi.

Pendapatan faktor yang dibayarkan oleh produsen tersebut merupakan sumber penerimaan bagi rumah tangga yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. Konsumsi tersebut meliputi Pengeluaran berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen (perusahaan); Atau dengan kata lain pendapatan di satu sisi akan sama dengan Pengeluaran di sisi yang lain. Dengan demikian maka aliran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen akan sama dengan aliran uang yang dibayarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa tersebut.

Dalam kenyataannya, barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun barang modal, tidak semuanya berasal dari dalam negeri tetapi bisa juga sebagian dari luar negeri (impor). Juga sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan didalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri tetapi sebagian digunakan oleh luar negeri (ekspor).

Seluruh aktivitas dan transaksi perdagangan tersebut akan tergambar dalam sistem **perekonomian terbuka** yang strukturnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perekonomian sistem tertutup. Interaksi perdagangan antara pelaku ekonomi domestik dengan luar negeri akan menyebabkan terjadinya aliran devisa baik masuk maupun keluar wilayah. Dalam hal pendapatan regional, pengertian luar negeri bisa juga mencakup luar daerah atau luar wilayah.

**Gambar 2.2. Siklus Transaksi Ekonomi Terbuka**



Berdasarkan siklus ekonomi terbuka tersebut, Produk Domestik Regional Bruto, dapat dideskripsikan secara lebih jauh sebagai berikut:

- Kalau ditinjau dari segi produksi (arus nilai tambah) disebut sebagai Produk Regional, yang merupakan penjumlahan komponen nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi (produsen) di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- Kalau ditinjau dari segi pengeluaran atau Pengeluaran disebut sebagai pengeluaran/Pengeluaran atas produk regional (*regional expenditure*), yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, maupun produsen dalam bentuk konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori serta ekspor dan impor suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- Kalau ditinjau dari segi pendapatan disebut sebagai pendapatan regional (*regional income*) yang merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh

faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

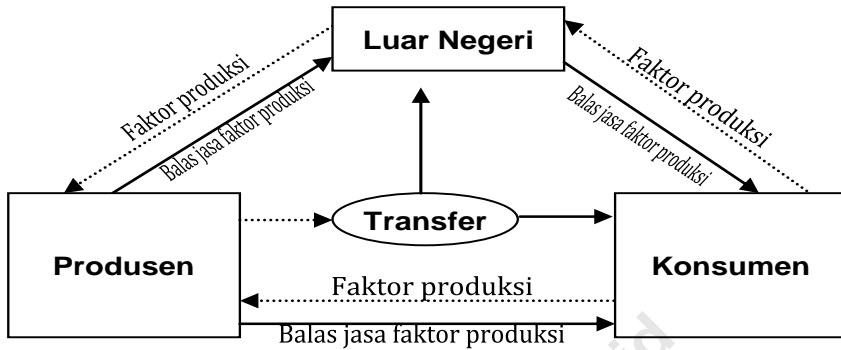
## 2.2 Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional

Tujuan akhir dari pengukuran PDRB adalah untuk menghitung besarnya “pendapatan” yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan yang diterima inilah yang akan menjadi dasar ukuran kemakmuran suatu wilayah, karena dengan adanya pendapatan tersebut menyebabkan masyarakat dapat membiayai kebutuhannya. Analoginya, bahwa pendapatan tercipta akibat dari adanya proses produksi, dimana kemudian pendapatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pembiayaan konsumsinya. Pendapatan yang berasal dari kompensasi faktor produksi ini akan di-redistribusikan kembali diantara kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau transfer, atau pemberian dalam bentuk lain (natura) secara cuma-cuma yang bersifat tidak mengikat.

Pendapatan yang mengalir antar wilayah tersebut dapat berupa pendapatan faktor itu sendiri (distribusi primer) atau redistribusi pendapatan (distribusi sekunder), antar pelaku ekonomi maupun antar wilayah dalam bentuk pemberian atau penerimaan hibah atau transfer. Dengan demikian maka untuk memperoleh gambaran penerimaan masyarakat yang sesungguhnya (pendapatan disposabel) harus diperhitungkan pula dengan aliran pendapatan yang mengalir keluar maupun yang masuk di wilayah tersebut, baik dalam bentuk pendapatan faktor neto maupun transfer/hibah neto.

Dalam kenyataannya, pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah belum tentu seluruhnya dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ada sebagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah lain, begitu pula sebaliknya, ada pula pendapatan yang berasal dari wilayah lain yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Implikasi dari kondisi tersebut adalah terjadinya aliran pendapatan antar wilayah, atau timbulnya arus pendapatan yang mengalir dari suatu daerah ke daerah lainnya, sebagaimana dijelaskan pada diagram berikut ini:

**Gambar 2.3: Arus Pendapatan Faktor Regional**



Pendapatan masyarakat yang berupa balas jasa faktor produksi, baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke wilayah lain (faktor produksi dimiliki oleh wilayah lain), disebut sebagai pendapatan regional. Kemudian pendapatan regional yang ditambahkan dengan transfer yang diterima dikurangi dengan transfer yang dibayar ke wilayah lain ini disebut penerimaan disposibel regional. Penerimaan atas pendapatan faktor milik sendiri maupun yang diterima dari pendapatan faktor pihak lain ini digambarkan sebagai penerimaan masyarakat yang benar-benar dapat dibelanjakan dan dinikmati masyarakat di wilayah tersebut (*disposable income*).

Transfer merupakan proses pendistribusian atau pengalokasian kembali pendapatan faktor yang diberikan oleh pemilik faktor produksi kepada pihak lain secara cuma-cuma, atau tanpa adanya suatu kewajiban. Diartikan juga sebagai pemberian yang bersifat tidak mengikat yang digambarkan sebagai proses redistribusi pendapatan masyarakat sebagai akibat dari adanya dorongan, motivasi serta tindakan sosial.

Transfer yang dimaksud disini adalah transfer berjalan (*current transfer*) seperti halnya sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan, sumbangan kesehatan dan sebagainya. Dilihat dari lalu lintasnya maka transfer dapat terjadi antar rumah tangga, antara rumah tangga dengan pemerintah, antar pemerintah, antara rumah tangga dengan perusahaan, antar perusahaan serta antara perusahaan dengan pemerintah.

Dengan demikian pendapatan yang diterima masyarakat yang diterima dari berbagai sektor ekonomi produksi, akan didistribusikan atau dialokasikan kembali kepada pihak-pihak lain di dalam wilayah maupun antar wilayah. Relokasi pendapatan dalam bentuk transfer akan menyebabkan terjadinya transaksi penerimaan bagi kelompok penerima pendapatan dan kelompok pemilik faktor produksi. Sebagai contoh ada orang yang mempunyai pendapatan sebagai pemilik faktor produksi tetapi juga menerima bagian dari pendapatan milik pihak lain dalam bentuk hadiah atau sumbangan.

PDRB menurut lapangan usaha (pendekatan nilai tambah) lebih mencerminkan tentang tingkat produktivitas suatu daerah/wilayah; Data tersebut menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output (produk) serta dalam menciptakan nilai tambah.

PDRB menurut Pengeluaran lebih menggambarkan tentang bagian dari produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal serta yang dieskpor. Untuk melihat peran ekonomi domestik maka total PDRB menurut sektor tersebut harus dikurangi dengan impor. PDRB menurut Pengeluaran dapat pula diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menggunakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi maupun untuk tabungan, dimana tabungan tersebut merupakan sumber investasi domestik (dilihat dari aspek moneter).

Sementara itu transaksi ekspor dan impor lebih menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan yang berasal dari transaksi perdagangan dengan wilayah lain, termasuk luar negeri. Sedangkan PDRB menurut pendekatan pendapatan lebih menekankan tentang aspek pemerataan pendapatan.

Tipikal arus transaksi yang sama berlaku pula bagi kegiatan dalam proses distribusi (*primary distribution*) serta redistribusi pendapatan (pengalokasian kepada pihak lain atau disebut sebagai transfer). Proses ini bisa juga terjadi antar daerah atau antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap struktur pendapatan atau penerimaan daerah.

Dengan demikian sebenarnya data agregat makro pendapatan disposabel regional (*regional disposabel income*) dapat lebih menggambarkan informasi tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan sebagai dampak pembangunan, yang benar-benar potensi untuk dinikmati atau diakses oleh masyarakat.

Apabila dilihat dari ukuran pemerataan orang-perorang (nilai rata-rata), maka PDRB perkapita yang disebut sebagai ukuran produktivitas tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap individu di wilayah tersebut untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah; Sedangkan pendapatan regional perkapita yang disebut sebagai ukuran kemakmuran menggambarkan tingkat kesejahteraan potensial yang dapat dinikmati oleh setiap individu di wilayah tersebut, tanpa perlu membedakan faktor jabatan, usia, jenis kelamin, suku bangsa, ataupun aspek sosial ekonomi lainnya.

### **2.3. Klasifikasi Kegiatan**

Pelaku kegiatan (aktivitas), transaksi maupun produk ekonomi yang terjadi di suatu wilayah sangat beraneka ragam dilihat dari sifat maupun jenisnya. Maka untuk kepentingan analisis, berbagai kategori atau karakteristik yang sangat beragam tersebut perlu dikelompok-kelompokkan ke dalam bagian-bagaian yang lebih kecil.

Maksud utama pengelompokan melalui proses klasifikasi ini adalah untuk menghimpun data/informasi yang sangat heterogen ke dalam golongan yang sesuai sehingga karakteristiknya menjadi relatif sama (homogen). Keceragaman dalam konsep, definisi serta klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar daerah/wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu menjadi lebih baik dan lebih tepat.

Penggolongan yang paling sederhana adalah menurut pelaku ekonomi yang secara garis besar terbagi atas konsumen, produsen, pemerintah dan luar negeri. Penggolongan ini tentunya didasarkan pada fungsi dan tujuan utama masing-masing pelaku ekonomi tersebut. SNA 2008 menggolongkan pelaku-pelaku ekonomi (*actors*)

menjadi korporasi (finansial dan non-finansial), rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah, serta luar negeri (*rest of the world*). Konsep konsumen selama ini dipakai identik dengan rumah tangga sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pelaku-pelaku ekonomi produksi. Lingkup ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi yang digunakan dalam SNA 2008 yang lebih cenderung membuat klasifikasi berdasarkan institusi atau kelembagaan. Institusi ini bisa dalam bentuk perorangan atau pun kolektif.

Untuk selanjutnya transaksi-transaksi tersebut yang akan menjadi dasar penggolongan PDRB menurut permintaan/Pengeluaran akhir ini akan dibedakan sebagaimana berikut:

1. Konsumsi akhir

- Rumah Tangga (RT)
- Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT)
- Pemerintah (Pem)

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

- Rumah tangga
- Pemerintah
- Badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD)
- Perusahaan swasta

3. Inventori (persediaan)

4. Perdagangan antar-wilayah

- Keluar (domestik, *outflow*)
- Masuk (domestik, *inflow*)

5. Perdagangan antar-negara

- Ekspor (luar negeri, *outflow*)
- Impor (luar negeri, *inflow*)



## 6. Diskrepansi statistik

Dengan demikian maka penggolongan tersebut merupakan kombinasi antara jenis transaksi, pelaku transaksi, serta wilayah transaksi yang dirinci sesuai dengan kepentingan analisis. Sementara itu meskipun sangat dimungkinkan tetapi komponen inventori tidak digolongkan secara rinci karena pertimbangan teknis semata.

Penilaian PDRB menurut Pengeluaran lazim dilakukan dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*), yang dengan kata lain disebut sebagai pendekatan tidak langsung (*indirect method*). Sampai sekarang, pendekatan dengan cara konvensional ini masih digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia karena dianggap sebagai cara yang relatif mudah, praktis dan efisien.

Pendekatan arus komoditi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap berbagai produk barang dan jasa (komoditi) baik yang berasal dari produk domestik maupun impor yang dikonsumsi oleh pelaku-pelaku ekonomi bersangkutan. Karena informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen pelaku konsumsi akhir bersangkutan belum memadai (kelengkapan, akurasi dan kesinambungan) menyebabkan metode ini masih direkomendasikan sampai saat ini. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar data konsumsi akhir ini diperoleh dari hasil sistem pencatatan administrasi.

### 2.4. Konsep Secara Umum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa data PDRB ini sebagian besar diturunkan dari data neraca produksi. Khusus untuk PDRB menurut Pengeluaran, penggolongan dilihat dari struktur sisi keluaran (*output*). Pada sisi ini dapat ditelusuri lebih jauh Pengeluaran atas produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut.

Dengan demikian maka seluruh transaksi yang ada dipastikan mempunyai keterkaitan dengan transaksi pada neraca-neraca lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (*articulated*). Neraca produksi merupakan neraca yang pertama kali terbentuk dalam perangkat data sistem neraca nasional (SNN) yang pada

gilirannya akan menurunkan neraca-neraca berikutnya. Dari neraca produksi inilah pengukuran komponen PDRB melalui kedua pendekatan tadi dapat disajikan.

Beberapa konsep dasar yang melatarbelakangi penyusunan neraca nasional pada umumnya serta PDRB diuraikan di bawah ini.

- Wilayah ekonomi

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi: wilayah udara, daratan dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

- Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, yang dibedakan dengan luar daerah berdasarkan konsep residen, bukan karena unsur kedaerahan yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi yang dikelola oleh residen.

- Residen

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi dalam batas ekonomi suatu daerah (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai dengan dua faktor penting yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas berproduksi dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya satu tahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritorial suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu daerah dianggap sebagai sektor luar daerah/luar negeri/asing (*non-resident*).

- Produk

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di wilayah domestik, pada satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*goods*) serta jasa (*services*).

- Produk Domestik

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan produk yang berasal dari produk domestik dan impor disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

- Neraca Produksi

Neraca produksi adalah neraca dasar yang disajikan dalam format “T” yang berisikan data tentang perilaku dan proses produksi, yang alur prosesnya terdiri dari input, transformasi serta keluaran (output). Pada lajur kiri neraca disajikan data struktur input yang menggambarkan pengeluaran dari kegiatan produksi, yang secara garis besar dibedakan atas input antara dan input primer (nilai tambah bruto); Sedangkan pada lajur kanan diuraikan struktur keluaran yang bisa digolongkan lebih jauh menurut sifat produk, jenis produk, serta tujuan Pengeluaran produk.

- Domestik

Batas domestik adalah batas teritorial kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritorial suatu negara secara hukum (batas administrasi), merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

- Nasional dan Regional

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah segmen PDB nasional berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi, yang mengacu pada pembagian wilayah administrasi pemerintah yang berlaku. Secara hirarkhi tingkat agregasi produk terdiri dari tingkat nasional (Indonesia), propinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan kepentingan analisis maka batasan regional bisa pula dibuat menurut kelompok lain, seperti pengelompokan menurut pulau atau kepulauan atau pengelompokan menurut wilayah pembangunan.

- PDRB dan PDRN

PDRB merupakan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik yang dibedakan dengan PDRN karena unsur penyusutan. Produk domestik regional bruto (PDRB) dikurangi dengan penyusutan sama dengan produk domestik regional neto (PDRN). Dalam pengukuran PDRB baik menurut sektor maupun menurut Pengeluaran unsur penyusutan harus diperhitungkan untuk menghindari terjadinya pencatatan yang tumpang tindih.

Penghitungan atau pengukuran PDRB menurut lapangan usaha (nilai tambah sektor produksi) maupun PDRB menurut pengeluaran/Pengeluaran dilakukan dengan metode dan tatacara penghitungan yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu mengukur tingkat kemakmuran masyarakat.

Apabila penghitungan dari sisi lapangan usaha lebih menekankan pada proses penciptaan (distribusi primer) oleh berbagai sektor ekonomi maka penghitungan PDRB menurut Pengeluaran lebih menekankan pada bagaimana pendapatan masyarakat digunakan atau dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi akhir. Konsumsi akhir produk barang dan jasa bisa berasal dari produk domestik bisa pula dari wilayah lain (termasuk impor).

Pada umumnya cara pengukuran PDRB menurut pengeluaran menggunakan metode arus komoditi (*commodity flow method*), yaitu dengan cara menelusuri alokasi barang dan jasa yang tersedia (*supply*) yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di suatu wilayah, pada satu kurun waktu tertentu. Barang dan jasa tersebut bisa berasal dari produk domestik maupun impor (baik yang berasal dari wilayah lain maupun negara lain).

Melalui pendekatan ini dapat dilihat konsistensi dan keterkaitan antara transaksi *supply* dengan *demand* berbagai pelaku ekonomi. Salah satu parameter atau data agregat pokok yang dapat diturunkan dari perhitungan PDRB ini adalah pertumbuhan ekonomi atau yang biasanya disebut sebagai pertumbuhan riil. Parameter ini memberikan indikasi tentang perubahan kuantitas produk atau volume yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi produksi.

Apabila pertumbuhan dari masing-masing sektor ekonomi produksi tersebut diagregasikan maka akan membentuk pertumbuhan ekonomi. Lazimnya metode harga konstan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan metode yaitu i) revaluasi, ii) ekstrapolasi dan iii) deflasi. Tentu saja pendekatan mana dari ketiga metode tersebut yang dipakai harus disesuaikan dengan tingkat ketersediaan data (volume dan harga) pada masing-masing komoditi komponen PDRB.

Khusus bagi PDRB menurut pengeluaran metode deflasi merupakan pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan karena pertimbangan praktis, yaitu tidak tersedianya data volume konsumsi akhir pada masing-masing komoditi komponen PDRB. Deflasi adalah cara menghitung nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk) yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku (adhb). Apabila perhitungan PDRB adhb memberikan gambaran tentang perubahan volume maupun harga, maka PDRB adhk hanya menggambarkan tentang perubahan volume saja (perubahan harga sudah dieliminasi).

PDRB menurut Pengeluaran menggambarkan Pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut secara garis besar ada dua macam yaitu Konsumsi Antara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan Konsumsi Akhir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk konsumsi akhir meliputi:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan
- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
- e. Perubahan Stok
- f. Ekspor
- g. Impor

PDRB menurut Pengeluaran di substitusikan ke dalam persamaan:

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_f + I_s + X - M$$

Dimana:

$C_h$  = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

$C_n$  = Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

$C_g$  = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan  
Pertahanan

$I_f$  = Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

$I_s$  = Perubahan Stok

$X$  = Ekspor

$M$  = Impor

## 2.5. Komponen PDRB Menurut Pengeluaran

### 2.5.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka secara bersama mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru, dikurangi hasil penjualan neto barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok ;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*) ;
- segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala ;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, tanaman hias ;
- barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan sebagainya; serta
- jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga.

Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri diperlakukan sebagai transaksi impor, sebaliknya pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan. Termasuk dalam konsumsi rumah tangga adalah pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali) seperti hasil karya seni dan barang antik (yang dihitung nilai marjinnya). Meskipun barang tersebut sudah dinilai pada saat diproduksi, tetapi karena nilainya cenderung naik maka umumnya dari waktu ke waktu harga barang tersebut relatif lebih mahal. Pembelian atas produk lama semacam ini diperlakukan sebagai pembelian produk baru.

Begitu pula dengan imputasi sewa rumah. Alasan diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri, karena dalam hal ini rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi diri sendiri. Imputasi sewa rumah adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut

adalah milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkan adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak (karena mendapat subsidi).

Dalam komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk imputasi atas jasa layanan lembaga keuangan (seperti bank) yang disebut sebagai FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*). Pengeluaran tersebut berupa perkiraan nilai jasa layanan lembaga keuangan atas tabungan dan pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk transaksi bunga. Transaksi pembayaran maupun penerimaan bunga oleh rumah tangga tidak digolongkan sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai bagian dari transaksi penerimaan lain (*property income*).

Pengeluaran peralatan kerja yang terkait dengan aktivitas pekerjaannya, tidak digolongkan sebagai konsumsi rumah tangga. Contoh apabila buruh tambang membeli peralatan sekop, linggis, lampu senter untuk mendukung pekerjaannya (dengan biaya ditanggung perusahaan), maka pengeluaran ini tidak termasuk sebagai konsumsi rumah tangga buruh tambang, tetapi merupakan biaya antara dari perusahaan tambang tempat buruh bekerja.

Model yang digunakan untuk kelompok ini adalah fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

Dimana:

$Q_i$  = Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

$a$  = konstanta

$Y_i$  = Pendapatan per kapita sebulan

$b$  = Koefisien elastisitas



Koefisien elastisitas (b) pada dasarnya merupakan elastisitas pendapatan perkapita dari kuantum konsumsi (*Income Elasticity of Consumption*).

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan mengikuti fungsi linier, artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi bukan makanan. Dengan kata lain konsumsi bukan makanan tidak akan pernah sampai pada titik jenuh. Pola hubungan linier ini dapat diformulasikan sebagai:

$$C_i = a + bY_i$$

Dimana:

$C_i$  = Rata-rata nilai pengeluaran konsumsi perkapita sebulan untuk kelas/kelompok pendapatan rumah tangga ke i

a = konstanta

$Y_i$  = Pendapatan per kapita sebulan untuk kelas/kelompok pendapatan rumah tangga ke i

b = Koefisien fungsi linier

### 2.5.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB dalam SNN merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto (PMB). PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas.

Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi belum diperhitungkan. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok yaitu : menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*) dan menurut institusi. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/ penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang menguasainya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut.

1. PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

- i. penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, kendaraan dan ternak;
- ii. perbaikan besar aset berwujud; dan
- iii. biaya transfer kepemilikan aset.

2. PMTB menurut Lapangan Usaha

Yang dimaksud di sini adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tertier ini secara rinci terdiri atas lapangan usaha: Pertanian; Pertambangan & penggalian; Industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang; Bangunan/Konstruksi; Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transporasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya .

Rincian PMTB pada setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- i. di lapangan usaha pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil

produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharannya;

- ii. di lapangan usaha pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam memproduksi di sektor pertambangan;
- iii. di lapangan usaha industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya;
- iv. di lapangan usaha pengadaan listrik, gas dan pengadaan air pengelolaan sampah dan daur ulang: mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/ penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
- v. di lapangan usaha bangunan atau konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi. Termasuk di sini kantor beserta peralatannya, alat-alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi;
- vi. di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan usaha akomodasi dan makan minum adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal beserta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai. Termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya;

- vii. di lapangan usaha transpor dan pergudangan dan lapangan usaha informasi dan komunikasi adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain: bus, truk, sado, bajaj, becak, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.
- viii. di lapangan usaha jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan;
- ix. di lapangan usaha administrasi pemerintahan hanya barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedung/kantor pemerintah, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-jalan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan; dan

- x. di lapangan usaha jasa-jasa: jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya, berupa gedung sekolah, rumah sakit, alat peraga pendidikan dan alat-alat kesehatan, gedung bioskop, taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

### 3. PMTB menurut institusi

Penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi di sini dibedakan menurut Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumah tangga) yang meliputi:

- i. pemerintah mencakup pengeluaran untuk barang modal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa, pembuatan gedung atau bangunan kantor, perumahan dinas, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, jalan & jembatan dan infrastruktur lainnya;
- ii. BUMN/D, barang modalnya antara lain: lapangan terbang, pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, pesawat terbang dan sebagainya; dan
- iii. swasta dan rumah tangga, barang modal yang dikuasai dapat berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan sebagainya.

#### 2.5.3. Perubahan Inventori

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000 yaitu pada triwulan I tahun 2004 komponen perubahan inventori mulai diperkenalkan. Komponen perubahan inventori sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB menurut Pengeluaran.

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif)

Secara umum Inventori ini meliputi:

- Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi
- Barang yang belum selesai dalam proses produksi
- Barang yang belum terjual
- Ternak potong
- Barang tahan lama yang masih dalam proses penyelesaian: seperti mesin-mesin, pesawat udara, kapal laut dan sejenisnya

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara maupun input akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- i. barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari: perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi/bangunan;
- ii. berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- iii. barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- iv. barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- v. ternak untuk tujuan dipotong;
- vi. barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- vii. pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- viii. stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **2.5.4. Transaksi Eksternal (Perdagangan antar-wilayah)**

Transaksi eksternal atau transaksi ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa antar-wilayah/daerah ini menjelaskan tentang proses atau alur distribusi produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut. Karena lebih menekankan pada aspek riil maka yang dimaksud dengan produk di sini adalah berbagai jenis barang dan jasa atau yang disebut pula sebagai komoditas.

Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah wilayah negara lain (luar negeri) maupun wilayah atau daerah lain (propinsi maupun kabupaten), diluar wilayah domestik. Pada prinsipnya meskipun transaksi antar-negara dan antar-daerah sama dalam pengertian perilaku (perdagangan antar-wilayah) namun sebenarnya maknanya agak berbeda.

Transaksi antar-negara selain menunjukkan ketergantungan ekonomi suatu wilayah pada negara lain juga menyebabkan terjadinya aliran devisa (masuk maupun ke luar), sementara di sisi lain perdagangan antar-daerah hanya menyebabkan terjadinya aliran mata uang lokal (rupiah) antar-daerah.

Dilihat dari kegiatan ekspor, dengan ke luarnya sebagian produk domestik ke negara lain maka akan menciptakan arus masuknya mata uang asing, sedangkan sebaliknya kegiatan impor akan menyebabkan mengalirnya

pendapatan nasional (regional) ke luar negeri, sebagai akibat dari masuknya produk-produk negara lain.

Pada akhirnya kedua model transaksi tersebut akan mempengaruhi struktur pendapatan nasional (regional). Perbedaan transaksi antar-wilayah ini utamanya dibatasi oleh konsep wilayah ekonomi yang terdiri dari dua unsur yaitu “residen” dan “kegiatan ekonomi”.

Pengelompokan residen dan non-residen berkaitan dengan kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sebagai residen atau non-residen tersebut meliputi penduduk atau rumah tangga, perusahaan atau korporasi, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga nirlaba atau lembaga-lembaga internasional lainnya seperti ILO, UNHCR, World Bank (Bank Dunia), IMF dan lain sebagainya.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam transaksi eksternal antara lain:

#### 1. Antar-negara (Ekspor dan Impor)

Transaksi perdagangan antar-negara ini dicirikan melalui 2 (dua) aktivitas yang berlawanan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri sebaliknya disebut impor apabila produk tersebut masuk ke dalam wilayah ekonomi (domestik). Meskipun secara garis besar penggolongannya terbagi atas barang dan jasa tetapi jenis-jenis komoditas yang diekspor bisa berbeda dengan komoditas impor, tergantung kepada kebutuhan pasar di negara lain maupun di wilayah tersebut .

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi penjualan, pertukaran (*barter*), atau hadiah (*gifts*) atau hibah (*grants*) yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara/wilayah (*region*) dengan non-residen atau pihak luar negeri atau wilayah (*region*) lain.

Sedangkan impor merupakan transaksi ekonomi berupa pembelian, pertukaran (*barter*), penerimaan hadiah (*gifts*), hibah (*grants*), berbagai jenis barang dan jasa oleh residen dari non-residen. Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi



yang dilakukan antara unit-unit institusi atau pelaku ekonomi suatu negara dengan unit-unit ekonomi negara lain.

## 2. Antar-daerah

Sebenarnya sampai sekarang belum ada satu pun panduan resmi yang menjelaskan tentang tata cara pencatatan kegiatan antar-daerah di dalam wilayah domestik suatu negara, sehingga pada prakteknya setiap negara mempunyai pendekatan sendiri yang berbeda-beda dalam upaya mengukur jenis transaksi perdagangan yang mendominasi peta ekonomi di setiap daerah di dalam negaranya.

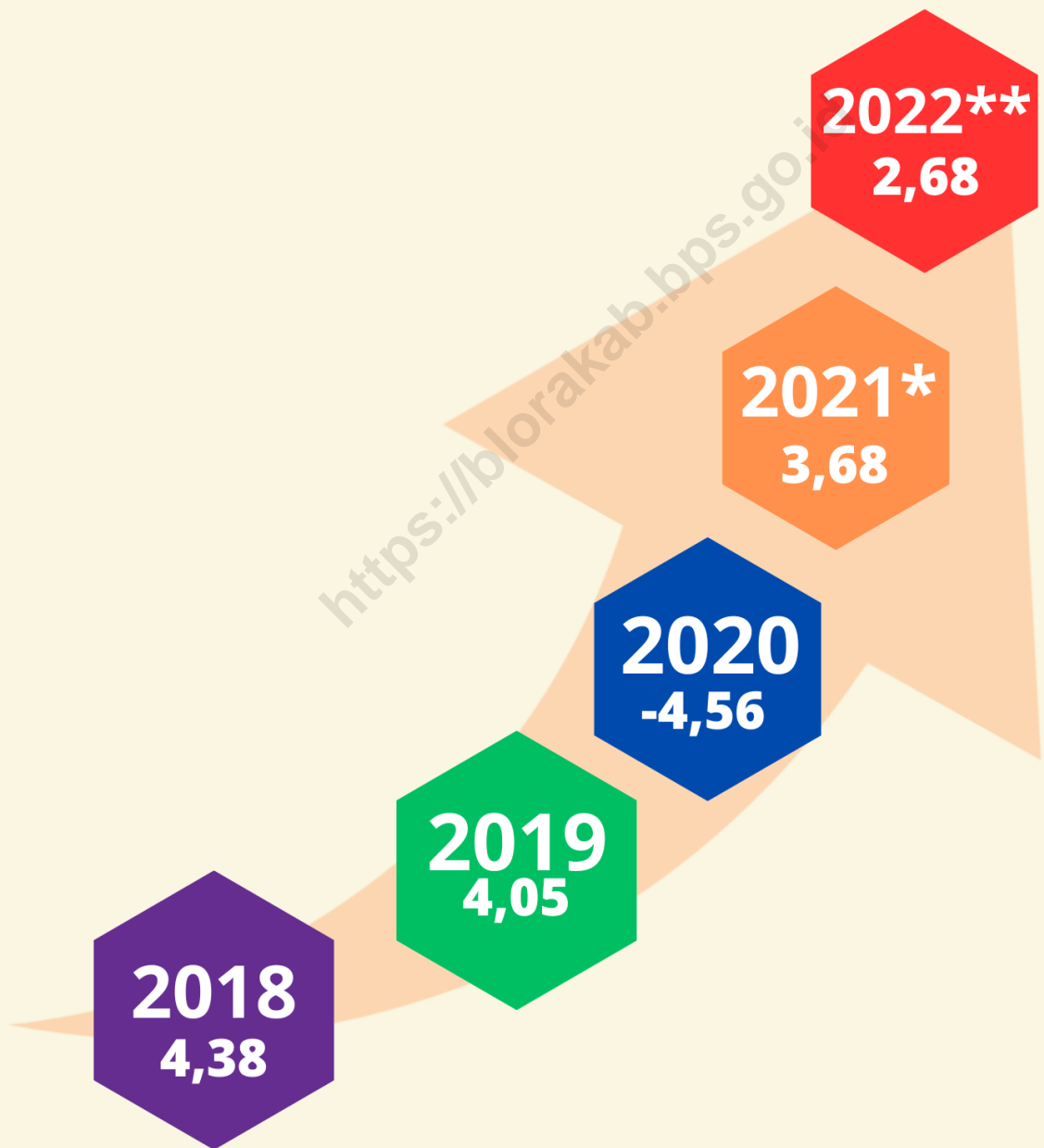
Lemahnya sistem administrasi pemerintahan dalam menyusun jenis statistik ini berdampak terhadap kualitas pengumpulan data transaksi yang sangat berarti dalam konteks mikro atau semi mikro ini. Dengan demikian dalam kaitannya dengan penyusunan statistik PDRB di sini, untuk selanjutnya yang dimaksud dengan transaksi eksternal antar-wilayah adalah sistem perdagangan barang dan jasa antara suatu wilayah dengan wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi dengan luar negeri).

Hampir seluruh wilayah di Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan wilayah-wilayah lainnya. Perbedaan struktur dan aktivitas ekonomi menyebabkan lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi subur dan menjadi kian dominan. Produk barang dan jasa yang diperdagangkan antar-daerah ini bisa berupa produk yang sejenis atau yang berbeda, tergantung pada kebutuhan masyarakat.

Perdagangan produk ke luar suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya aliran dana yang masuk ke wilayah tersebut, sedangkan sebaliknya produk masuk ke wilayah tersebut akan menyebabkan aliran dana ke luar wilayah. Kedua perilaku transaksi ekonomi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pula pada pendapatan wilayah (regional), dan pada gilirannya pada sistem pembangunan ekonominya.

<https://blorakab.bps.go.id>

# Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora 2018-2022 (persen)



<https://blorakab.bps.go.id>

## **Bab III**

### **ULASAN**

#### **3.1. Selayang Pandang Perekonomian Global**

Setelah hantaman pandemi Covid-19 di tahun 2020, pada tahun 2021 dan 2022 upaya pengendalian Covid-19 gencar dilakukan. Pemulihan global pada tahun 2021 dan 2022 sebagian besar di dorong oleh belanja konsumen yang meningkat dan penyerapan investasi. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran tumbuh menguat terutama sub komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga yaitu transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya. Meskipun covid-19 belum sepenuhnya hilang, situasi penularan covid-19 cukup terkendali setelah pemerintah memutuskan mencabut aturan PPKM akhir tahun 2022 secara bertahap. Jika situasi terus terkendali, status kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipertimbangkan untuk dicabut sepenuhnya. Pencabutan status pandemi itu merupakan kewenangan WHO. Karena itu masyarakat perlu memahami sekalipun kita sudah mencabut PPKM, pandemi covid-19 belum berakhir.

Pada masa transisi dari pandemi menuju endemi, pemerintah menerapkan kebijakan dan himbauan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Keberhasilan penanganan pandemi dan berbagai kebijakan yang longgar bagi pelaku perjalanan memberikan dampak yang positif baik domestik maupun luar negeri.

PDB Indonesia tahun 2022 secara total tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,70 persen. Dari sisi demand, komponen ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,28 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga tingkat PDB per kapita penduduk Indonesia berhasil naik dari 62,3 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 71,0 juta rupiah di tahun 2022 atau tumbuh sebesar 14,52 persen. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi 2022 ditopang oleh pertumbuhan positif hampir semua komponen utama PDB Pengeluaran, kecuali

pengeluaran konsumsi pemerintah yang kontraksi sebesar 4,51 persen. Struktur kombinasi ekonomi nasional menurut pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PKRT) yang mencapai 51,87 persen pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, perekonomian Jawa Tengah membaik dibanding tahun 2021 dengan laju pertumbuhan PDRB mencapai 5,31 persen pada tahun 2022. Nilai ekonomi Jawa Tengah sebagian besar digerakkan oleh semua komponen yang tumbuh positif, meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, dan net ekspor yang melampaui nilai ekonomi melebihi prapandemi atau ekonomi pada tahun 2020 dan 2021. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi lebih dari 60 persen dalam membentuk ekonomi Jawa Tengah, sisanya berasal dari komponen yang lain.

Perbaikan kondisi perekonomian juga terjadi di Blora, pertumbuhan ekonomi Blora mencapai 2,68 persen pada tahun 2022. Dari sisi produksi, komponen yang mengalami laju pertumbuhan dua terbesar pada tahun 2022 adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 52,31 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,49 persen. Di sisi lain, dilihat dari kontribusinya pada tahun 2022, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi yaitu bila ditotal kontribusinya 48,24 persen dari total PDRB Blora. Peningkatan PDRB tahun ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha seiring dengan sejumlah pelanggaran kebijakan di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami kenaikan kecuali net ekspor. Laju komponen PKRT sebesar 5,30 persen, pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 4,28 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,38 persen, dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,01 persen.

### **3.2. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran**

PDRB menurut Pengeluaran memiliki formula  $C+G+I+X-I$ , atau merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (C), yang di dalamnya juga

termasuk pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit; pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G); Investasi yang terdiri atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Inventori (I) serta Ekspor (X) dikurangi dengan Impor (I). Dan bisa diringkas lagi menjadi 4 komponen, yaitu Komponen Konsumsi, Komponen Investasi, dan Ekspor Neto (Ekspor dikurangi Impor).

Dengan rumus:

$$\text{PDRB} = \text{Komponen Konsumsi} + \text{Komponen Investasi} + \text{Ekspor} - \text{Impor}$$

Komponen Konsumsi terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen Investasi terdiri atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Inventori. Dari rumus tersebut mengatakan bahwa PDRB akan berbanding lurus dengan konsumsi, investasi dan ekspor. Semakin besar konsumsi, investasi dan ekspor, maka akan semakin besar PDRB suatu wilayah. Sebaliknya PDRB berbanding terbalik dengan impor, artinya semakin besar impor akan semakin mengecilkan nilai PDRB suatu wilayah. Apabila diaplikasikan pada suatu negara, semakin besar impor maka akan semakin menguras devisa negara tersebut.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi akhir, baik dengan cara membeli, menerima transfer atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah tangga. Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (non-market). Seluruh atau sebagian pembiayaan kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Oleh karenanya hampir seluruh aktivitas lembaga dirancang dan dikontrol oleh rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar.

Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (unit vertikalnya) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa beserta perangkat dinas pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas. Barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan.

Ekspor neto merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor impor merupakan transaksi ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa antar-wilayah/daerah ini menjelaskan tentang proses atau alur distribusi produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut.



PDRB Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami peningkatan 4,04 triliun rupiah, dari 26,93 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 30,97 triliun rupiah pada tahun 2022.

PDRB Pengeluaran dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu pengeluaran konsumsi; pengeluaran PMTB dan Inventori; dan Ekspor Neto. Pada tahun 2022, ketiga komponen ini seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen Konsumsi meningkat dari 20,32 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 22,19 triliun rupiah di tahun 2022, atau bertambah sebesar 9,17 persen. Komponen Investasi (PMTB dan Inventori) juga mengalami peningkatan dari 3,22 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,61 triliun rupiah pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 11,86 persen. Selanjutnya Ekspor Neto yang merupakan selisih ekspor dan impor mengalami peningkatan signifikan, dari 3,38 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 5,17 triliun rupiah di tahun 2022. Nilai Ekspor Neto yang bernilai positif menggambarkan masih ada surplus barang dan jasa.

**Tabel 3.1. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	18.163,12	19.528,11	19.434,83	20.325,40	22.188,41
Komponen Investasi	2.882,55	3.132,03	2.916,46	3.225,00	3.607,63
Ekspor Neto	3.585,87	3.305,79	1.652,93	3.378,20	5.172,86
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>24.631,54</b>	<b>25.965,94</b>	<b>24.004,21</b>	<b>26.928,61</b>	<b>30.968,89</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Permintaan akan barang dan jasa akan memicu pertumbuhan konsumsi yang selanjutnya akan meningkatkan komponen investasi. Pada tahun 2022, untuk kembali membangkitkan perekonomian sangat penting untuk menjaga pertumbuhan konsumsi

masyarakat. Namun harus diwaspadai juga peningkatan konsumsi harus dijaga agar tidak memicu pertumbuhan impor barang dan jasa. Langkah-langkah untuk perlindungan produk lokal harus diambil sehingga pertumbuhan konsumsi dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi tahun 2022, pemerintah dapat mengambil strategi-strategi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dari sisi pendapatan, pemerintah masih dirasa perlu untuk membagikan sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Bantuan ini selain membantu mereka agar tingkat keparahan kemiskinan tidak semakin dalam juga untuk mempertahankan daya beli. Bantuan untuk masyarakat miskin cenderung akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Saat ini masyarakat lebih baik membelanjakan pendapatan yang dimiliki dibanding menyimpannya sebagai tabungan, karena hal tersebut akan membuat roda perekonomian berputar lebih cepat.

**Tabel 3.2. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	12.843,98	13.489,58	13.282,44	13.572,15	14.220,79
Komponen Investasi	2.031,97	2.150,06	2.041,45	2.198,14	2.358,47
Ekspor Neto	2.729,27	2.678,78	2.160,00	2.356,16	2.033,16
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>17.605,22</b>	<b>18.318,42</b>	<b>17.483,89</b>	<b>18.126,45</b>	<b>18.612,42</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Blora tahun 2022 meningkat sebesar 2,68 persen, dari 18,13 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 18,61 triliun rupiah di tahun 2022. Komponen konsumsi naik sebesar 4,78 persen, dari 13,57 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 14,22 triliun rupiah pada tahun 2022. Komponen Investasi (PMTB dan Inventori) mengalami peningkatan dari 2,20 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,36 triliun rupiah pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 7,29 persen. Selanjutnya, Ekspor Neto mengalami penurunan sebesar 13,71 persen, dari

2,36 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 2,03 triliun rupiah pada tahun 2022. Penurunan ini akibat imbas dari penurunan ekspor hasil minyak bumi untuk diolah ke cilacap. Turunnya jumlah produksi minyak mentah, secara otomatis ekspor ke luar Blora untuk di olah juga mengalami penurunan.

Secara umum, pola konsumsi masyarakat mengalami kenaikan imbas dari dibukanya PPKM. Berdasarkan survei susenas tahun 2022, diperoleh hasil bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi pada seluruh sub komponen yaitu makanan, minuman, selain restoran ; pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga; Kesehatan dan Pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; hotel dan restoran; dan lainnya. Komponen pembentuk modal tetap bruto juga mengalami kenaikan baik dari sub komponen bangunan dan non bangunan.

**Tabel 3.3. Distribusi Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Persen)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	73,74	75,21	80,96	75,48	71,65
Komponen Investasi	11,70	12,06	12,15	11,98	11,65
Ekspor Neto	14,56	12,73	6,89	12,55	16,70
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Distribusi PDRB merupakan gambaran besarnya sumbangan/*share* komponen tersebut terhadap PDRB. Semakin besar nilainya, berarti komponen tersebut semakin besar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB dan sebaliknya. Sampai saat ini komponen konsumsi mempunyai nilai share terbesar dibandingkan komponen lainnya yaitu sebesar 71,65 persen. Tingginya share konsumsi ini berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 63,04 persen, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah

tangga sebesar 1,41 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 7,20 persen. Hingga saat ini ekspor Blora yang cukup dominan adalah dari sektor Pertambangan Penggalian dan sektor Pertanian.

Indikator berikutnya adalah pertumbuhan komponen PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora menurut pengeluaran sebesar 2,68 persen. Pertumbuhannya positif (naik) tapi melambat karena turunnya produksi migas. Akan tetapi, secara atas dasar harga berlaku masih tetap aman karena harga migas naik sangat tinggi. Seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan akibat semakin pulihnya perekonomian seiring dengan pelonggaran PPKM.

**Tabel 3.4. Pertumbuhan Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Persen)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	4,84	5,03	-1,54	2,23	4,78
Komponen Investasi	6,12	5,81	-5,05	7,68	7,29
Ekspor Neto	1,05	-1,85	-19,37	8,79	-13,71
<b>PDRB</b>	4,38	4,05	-4,66	3,68	2,68

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

### 3.3. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga

Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi, dimana proporsi non makanan menjadi lebih besar dari proporsi makanan, dijadikan indikator kemampuan daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian.

Peningkatan konsumsi baik nominal maupun ragamnya, akan dibarengi meningkatnya permintaan akan barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun yang perlu diwaspadai ketika permintaan akan barang-barang konsumsi meningkat, dimana wilayah tersebut tidak bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri maka permintaan barang dan jasa akan impor dari luar daerah. Secara teori impor barang dan jasa akan menurunkan angka PDRB.

**Tabel 3.5. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adhd Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman selain Restoran	6.510,71	6.949,61	7.163,17	7.657,38	8.499,44
b. Pakaian dan Alas Kaki	578,57	620,86	648,82	662,50	699,30
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	1.829,79	1.938,31	1.964,56	1.999,74	2.089,24
d. Kesehatan dan Pendidikan	999,39	1.068,69	1.083,05	1.132,17	1.171,21
e. Transporasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4.265,92	4.713,42	4.487,28	4.648,29	5.301,37
f. Hotel dan Restoran	1.034,11	1.151,55	1.075,35	1.127,47	1.223,20
g. Lainnya	422,41	451,90	482,18	498,36	538,05
Pengeluaran Konsumsi Ruta	15.640,90	16.894,34	16.904,41	17.725,89	19.521,81
PDRB	24.631,54	25.965,94	24.004,21	26.928,61	30.968,89
Prosentase	63,50	65,06	70,42	65,83	63,04

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2022 meningkat sebesar 10,13 persen, dari 17,73 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 19,52 triliun rupiah di tahun 2022. Andil terhadap pembentukan PDRB Pengeluaran tahun 2022 sebesar 63,04 persen, mengalami penurunan dibanding

andil tahun sebelumnya, 65,83 persen. Hal ini karena dengan semakin pulihnya pandemi covid-19 dan pelonggaran PPKM, aktivitas pendidikan, perekonomian, dan sektor lainnya sudah mulai perlahan berjalan normal seperti sebelum pandemi.

Secara nominal, pengeluaran setiap subkomponen konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Begitupula dari sisi andil terhadap pembentukan PDRB Pengeluaran ADH Berlaku, seluruh komponen mengalami kenaikan. Tiga subkomponen yang memberikan andil terbesar dari tahun ke tahun masih tetap sama yaitu subkomponen konsumsi makanan, minuman selain restoran; pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; dan perumahan perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga.

**Tabel 3.6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman selain Restoran	4.286,19	4.451,04	4.497,12	4.597,94	4.844,86
b. Pakaian dan Alas Kaki	501,39	528,31	533,55	535,06	548,54
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	1.340,04	1.389,44	1.395,83	1.402,48	1.414,96
d. Kesehatan dan Pendidikan	767,33	803,14	828,65	838,01	854,02
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.257,57	3.492,29	3.318,74	3.480,36	3.781,41
f. Hotel dan Restoran	743,23	806,04	752,19	758,53	793,19
g. Lainnya	318,76	335,08	336,68	337,92	346,60
<b>Pengeluaran Konsumsi Ruta</b>	<b>11.214,51</b>	<b>11.805,33</b>	<b>11.662,77</b>	<b>11.950,31</b>	<b>12.583,58</b>

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Atas dasar harga konstan, pada tahun 2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,30 persen dari 11,95 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 12,58 triliun rupiah pada tahun 2022.

Semua sub komponen konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tiga sub komponen terbesar dengan proporsi lebih dari sepuluh persen masih ditempati sub komponen yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Proporsi terbesar ditempati sub komponen makanan, minuman selain restoran dengan proporsi mencapai 43,54 persen. Berikutnya adalah sub komponen Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya dengan proporsi 27,16 persen. Transportasi dan komunikasi sekarang menjadi sektor penting penunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, sub komponen ketiga yang dominan adalah perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah dengan proporsi 10,70 persen. Sedangkan empat sub komponen lainnya, andilnya relatif sama dengan tahun sebelumnya (dibawah 10 persen).

**Tabel 3.7. Distribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh Berlaku Tahun 2018 – 2022 (persen)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
1.a. Makanan, Minuman selain restoran	41,63	41,14	42,37	43,20	43,54
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,70	3,67	3,84	3,74	3,58
1.c. Perumahan, Perkakas, Perleng dan Penyel Rmh Tangga	11,70	11,47	11,62	11,28	10,70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,39	6,33	6,41	6,39	6,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	27,27	27,90	26,55	26,22	27,16
1.f. Hotel dan Restoran	6,61	6,82	6,36	6,36	6,27
1.g. Lainnya	2,70	2,67	2,85	2,81	2,76
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket: \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan sub komponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan laju tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tahun 2021 sebesar 4,87 persen, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 8,65. PPKM yang sudah dilonggarkan membuat mobilitas, aktivitas, dan keinginan berwisata masyarakat meningkat, khususnya sektor transportasi mengalami peningkatan cukup pesat tahun 2022 efek normalnya mobilitas masyarakat. Sub komponen hotel dan restoran juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan karena banyak kegiatan rapat/dinas yang menggunakan hotel kembali. Laju pertumbuhan sub komponen hotel dan restoran sebesar 4,57 persen, jauh mengalami kenaikan dari sebelumnya yang lajunya hanya 0,84 persen. Sub komponen yang tumbuh diatas empat persen pada tahun 2022 ada tiga yaitu transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya tumbuh sebesar 8,65 persen; makanan, minuman selain restoran tumbuh sebesar 5,37 persen, serta hotel dan restoran tumbuh sebesar 4,57 persen.

**Tabel 3.8. Pertumbuhan Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2018 – 2022 (persen)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	3	4	5	6	6
a. Makanan, Minuman selain restoran	4,81	3,85	1,04	2,24	5,37
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,03	5,37	0,99	0,28	2,52
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	4,19	3,69	0,46	0,48	0,89
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,56	4,67	3,18	1,13	1,91
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,79	7,21	-4,97	4,87	8,65
f. Hotel dan Restoran	6,06	8,45	-6,68	0,84	4,57
g. Lainnya	7,35	5,12	0,48	0,37	2,57
Pengeluaran Konsumsi Ruta	4,90	5,27	-1,21	2,47	5,30

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara



### 3.4. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit

Pengertian lembaga Non Profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. Secara khusus Bank Dunia mendefinisikan lembaga nirlaba sebagai *Non Government Organization (NGO)* atau kemudian juga diterjemahkan sebagai organisasi swasta yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada umumnya lembaga ini didalam operasionalnya disamping dukungan finansial ataupun non finansial dari rumah tangga juga tidak sedikit yang mendapat dukungan (finansial dan non finansial) dari pemerintah dan berbagai lembaga donor internasional. Karena sifatnya yang nirlaba, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga ini belum banyak menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kabupaten Blora. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pengeluaran konsumsi lembaga tersebut terhadap PDRB. Secara agregat peran ekonomi lembaga nirlaba atau Non Profit masih sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen-komponen penyusun PDRB yang lain.

Dilihat dari kontribusinya, tahun 2022 pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit tercatat sebesar 1,41 persen dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,46 persen. Di sisi lain, pertumbuhan pada tahun 2022 lembaga nirlaba tumbuh sebesar 4,28 persen.

**Tabel 3.9. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit  
Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	336,73	379,04	374,92	392,80	437,55
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	217,60	239,05	232,80	235,88	245,98
Distribusi (Adhb dalam %)	1,37	1,46	1,56	1,46	1,41
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	7,99	9,86	-2,62	1,33	4,28

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Kegiatan keagamaan mulai kembali normal, perayaan Idul Fitri, Qurban, dan kegiatan lembaga non profit lainnya mulai berangsur normal seiring dengan dilonggarkannya PPKM. Dampaknya, pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga juga mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2021.

Nilai konsumsi lembaga Non Profit adh berlaku pada tahun 2022 tercatat sebesar 437,55 milyar rupiah, meningkat 44,75 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi adh konstan tercatat sebesar 245,98 milyar rupiah, naik 4,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Sebagai lembaga yang memang tujuannya tidak mencari profit, dapat dipahami jika secara ekonomi kontribusi lembaga tersebut terhadap PDRB kecil.

Lembaga ini lebih banyak berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pembiayaannya ditanggung baik oleh masyarakat sendiri, lembaga donor maupun oleh pemerintah. Pada perkembangannya lembaga non profit di Indonesia, khususnya di Blora masih belum optimal seperti halnya di luar negeri. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga non profit masih belum kuat sehingga dukungan pembiayaannya masih belum optimal. Dari sisi SDM, umumnya pengelola lembaga non profit masih menjadikan kegiatan pada lembaga tersebut sebagai kegiatan sampingan.

Di sisi lain, tampaknya pemerintah belum bisa mengoptimalkan peran lembaga Non Profit ini untuk membantu dalam pelayanan masyarakat, hal bisa dilihat bahwa aliran dana untuk pelayanan masyarakat masih banyak yang bersifat langsung dari pemerintah kepada masyarakat tanpa melalui lembaga non profit.

### **3.5. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah pengeluaran konsumsi Pemerintah Kabupaten, ditambah dengan pengeluaran konsumsi Dinas Provinsi dan Dinas vertikal yang berada di Kabupaten tersebut. Termasuk belanja pemerintah yang langsung dialokasikan kepada masyarakat.

Sumber dana pengeluaran Konsumsi Pemerintah berasal baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari Pemerintah Propinsi dan Pusat ( dalam bentuk DAU/ DAK) maupun dari sumber pendapatan lain yang sah. Salah satu sumber pendanaan pemerintah adalah pajak. Dalam teori ekonomi, tingkat pajak akan mempengaruhi *mutiplier* regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan *multiplier* regional, akan tetapi pajak pada akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan regional.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, pemerintah membutuhkan anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin pegawai dan keperluan pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta belanja pemerintah lainnya.

Peran yang dimiliki oleh pemerintah ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Jumlah pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu komponen penting dari PDRB. Secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan lewat instrumen kebijakan fiskal. Instrumen ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian.

**Tabel 3.10. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	2.185,49	2.254,74	2.155,49	2.206,71	2.229,05
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	1.411,87	1.445,19	1.386,87	1.385,96	1.391,22
Distribusi (Adhb dalam %)	8,87	8,68	8,98	8,19	7,20
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	3,94	2,36	-4,04	-0,07	0,38

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan pada tahun 2022, yaitu sebesar 2.229,05 milyar rupiah., sedangkan tahun 2021 sebesar 2.206,71 milyar rupiah. Kontribusi pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2022 adh berlaku tercatat sebesar 7,20 persen, sedangkan pertumbuhan pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,38 persen. Kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah didukung oleh naiknya belanja pegawai pada tahun 2022. Kenaikan belanja pegawai ini tidak lain akibat imbas dari semakin normalnya aktivitas perkantoran pasca covid-19 setelah semakin longgarnya PPKM pada tahun 2022.

### 3.6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Para pakar ekonomi sependapat bahwa untuk mendorong roda perekonomian salah satu mesin penggeraknya adalah investasi. Dalam konteks PDRB Pengeluaran, investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah dengan Inventori. PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai “bruto” karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya.

PMTB adalah semua pengadaan barang modal untuk digunakan/dipakai sebagai aset yang tetap (*fixed assets*). Sumber dana investasi dapat berasal dari tabungan

domestik atau pinjaman luar negeri yang meningkatkan tingkat tabungan suatu daerah. Perkembangan lembaga keuangan juga mempengaruhi tingkat tabungan karena berhubungan dengan kemungkinan investor asing untuk melakukan investasi.

Bagi wilayah yang memiliki tingkat tabungan domestik tidak memadai untuk menjalankan negara sekaligus berinvestasi, maka alternatif yang dilakukan umumnya adalah melalui pinjaman luar negeri atau mengundang investor untuk berinvestasi. Dilihat dari institusi pelaku PMTB terbagi empat yaitu Swasta, Rumah Tangga, BUMN dan BUMD dan Pemerintah. Belanja pemerintah dalam bentuk barang modal (terutama Infrastruktur) menjadi stimulus yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi.

Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan investasi dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi. Dengan ICOR kita dapat melihat efisiensi Pengeluaran modal yang secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada tahun tertentu.

Kabupaten Blora yang memiliki potensi sumber daya alam, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Tetapi sebelum menanamkan modalnya, investor akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan lokasi, ketersediaan bahan baku, kemudahan akses dan yang tidak kalah penting adalah regulasi yang jelas untuk keberlangsungan suatu usaha.

Di Kabupaten Blora, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 meningkat dari 3,13 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,49 triliun rupiah di tahun 2022.

Kontribusi PMTB relatif stabil di kisaran 11 persen. Pada tahun 2022 sumbangan komponen ini tercatat sebesar 11,28 persen, turun tipis dibanding tahun sebelumnya. Untuk harga konstan angka PMTB bergerak dari 2,12 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 2,27 triliun rupiah di tahun 2022, atau naik sebesar 7,01 persen.

Secara umum, PMTB terbagi kedalam 8 jenis aset, yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, hewan menghasilkan berulang, tanaman menghasilkan berulang, produk kekayaan intelektual dan biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi. Tetapi karena kendala data dan metode penghitungannya, maka dalam memperoleh nilai PMTB sifatnya masih agregat (belum bisa dipecah ke dalam kelompok 8 tersebut).

**Tabel 3.11. Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	2.762,77	3.037,22	2.815,62	3.128,62	3.493,49
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	1.976,21	2.090,86	1.936,72	2.124,44	2.273,47
Distribusi (Adhb dalam %)	11,22	11,70	11,73	11,62	11,28
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	6,72	5,80	-7,37	9,69	7,01

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Terkadang PMTB yang dibentuk tidak langsung memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi, karena ada kalanya PMTB yang dibentuk bersifat investasi jangka panjang yang baru terlihat hasilnya pada tahun-tahun berikutnya. Seperti investasi dalam bentuk sarana dan prasarana, atau investasi pada sektor-sektor yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun pada suatu unit usaha untuk dapat memulai produksinya. Walaupun secara matematis ketika PMTB terbentuk pada tahun tersebut angka PDRB akan bertambah secara signifikan.

Mengingat pentingnya PMTB dalam menggerakkan perekonomian, maka kinerja PMTB ini mestinya perlu mendapat perhatian lebih pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 mendatang. Secara teori ekonomi terdapat beberapa kebijakan yang

dijadikan rujukan dalam meningkatkan kinerja PMTB atau investasi secara umum. Beberapa pendapat tersebut adalah :

1. Mengusahakan sarana dan prasarana perhubungan yang baik dan lancar, serta perbaiki arus komunikasi dan penyebar luasan informasi potensi wilayah.
2. Mengusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya, termasuk investasi swasta dalam dan luar negeri, dengan cara menawarkan program-program yang bisa dibiayai atau menarik untuk dibiayai.
3. Memantau kebutuhan wilayah lain atau luar negeri untuk melihat potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk memberikan penawaran.

Menarik investor untuk menanamkan modal baik berupa investasi kegiatan baru atau perluasan dari usaha yang telah ada sangatlah penting, karena dapat berdampak pada penambahan lapangan kerja yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga secara makro terjadi peningkatan pendapatan di wilayah tersebut selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian. Hal yang perlu mendapat perhatian tentunya adalah investasi diarahkan pada basis ekonomi yang banyak menggunakan komponen lokal, kalo bisa yang dapat bersinergi dengan usaha yang telah terbentuk sebelumnya.

Kendala yang menghambat masuknya para investor perlu di mitigasi agar tidak terjadi. Stabilitas sosial, regulasi, dan jaminan penanaman modal adalah beberapa faktor yang perlu di kendalikan untuk mendukung iklim investasi. Namun demikian pemerintah harus memastikan investasi yang ada tidak akan merusak lingkungan hidup dan tidak merugikan usaha-usaha yang telah ada sebelumnya.

### **3.7. Ekspor Neto**

Ekspor Neto merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Nilai ekspor neto muncul sejalan dengan keterbatasan data ekspor dan impor antar wilayah. Apalagi sebagai daerah yang terbuka secara ekonomi, pencatatan arus barang dan jasa sangat sangat sulit dilakukan. Untuk itulah digunakan suatu model yang berlandaskan pada teori input output. Ketika ada daerah yang kelebihan produksi maka biasanya akan melakukan ekspor, dan sebaliknya apabila suatu daerah mengkonsumsi suatu

barang dan jasa dan tidak diproduksi atau produksinya kurang bisa memenuhi di daerah tersebut, maka biasanya melakukan impor.

Dalam struktur permintaan akhir, Ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar atau non domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah Ekspor disamping merujuk pada barang dan jasa yang dibawa keluar dari suatu wilayah domestik, juga mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk luar wilayah atas produk ekonomi domestik.

Dalam teorinya mengatakan bahwa besaran ekspor berbanding lurus dengan besaran angka PDRB. Tetapi tidak semua wilayah dapat melakukan apa yang dinamakan dengan Ekspor tersebut. David Ricardo menyatakan bahwa ekspor atau perdagangan internasional dapat terjadi apabila terdapat perbedaan keunggulan komparatif dari setiap wilayah/negara. Keunggulan komparatif ini dapat dicapai apabila sebuah wilayah/negara mampu memproduksi sejumlah barang dengan volume besar namun dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Teori ini disebut sebagai teori Komperatif.

Tetapi ekspor juga bisa terjadi karena keunggulan kompetitif suatu wilayah, teori ini dikembangkan oleh Michael E. Porter, ia menyatakan: terdapat empat hal yang menyebabkan perusahaan dapat saling berkompetisi sehingga memunculkan adanya keunggulan kompetitif, kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri yang terkait dengan industri pendukung dan strategi, struktur dan persaingan.

Untuk bisa meningkatkan angka PDRB atau angka pertumbuhan ekonomi, salah satunya bisa didorong melalui ekspor. Untuk itu perlu kiranya pemerintah membuat kebijakan maupun rencana strategis yang terkait dengan ekspor. Beberapa pola kebijakan tersebut antara lain:

1. Mendorong usaha yang dikategorikan sebagai sektor basis, melalui peningkatan mutu supaya bisa bersaing dengan produk luar yang sejenis.
2. Mendorong industri pengolahan untuk lebih dominan memakai komponen atau bahan baku lokal



3. Mendorong penciptaan industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.
4. Menentukan sektor dan komoditi basis yang diperkirakan bisa tumbuh cepat dan orientasi ekspor secara berkesinambungan, serta dapat bersinergi dengan sektor lain sehingga mendorong sektor lain juga ikut tumbuh.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor barang dan jasa merupakan tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari luar wilayah (Blora). Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Blora, oleh karenanya impor bernilai negatif dalam penghitungan PDRB.

Meskipun secara teoritis kegiatan impor itu memperkecil angka PDRB, tetapi impor itu bisa dikatakan tidak dapat dipungkiri. Beberapa hal yang menyebabkan suatu wilayah melakukan impor antara lain:

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak ada atau tidak diproduksi di wilayah tersebut.
2. Impor yang dilakukan oleh suatu negara digunakan juga sebagai bagian dari alih teknologi.
3. Memperoleh bahan baku untuk proses lebih lanjut ataupun barang jadi untuk konsumsi. Tidak semua wilayah/negara bisa mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga dibutuhkan impor dari negara/wilayah lainnya.
4. Impor digunakan untuk menstabilkan harga. Biasanya untuk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat dan ketika terjadi gejolak harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah, maka kegiatan impor bisa digunakan sebagai alat penstabil.

**Tabel 3.12. Ekspor Neto Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	3.585,87	3.305,79	1.652,93	3.378,20	5.172,86
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	2.729,27	2.678,78	2.160,00	2.356,16	2.033,16
Distribusi (Adhb dalam %)	14,56	12,73	6,89	12,55	16,70

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2022 selisih nilai ekspor dan impor adh berlaku sebesar 1,79 triliun rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,38 triliun rupiah. Sedangkan nilai ekspor neto adh konstan tercatat sebesar 2,03 triliun rupiah, nilainya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi komponen sebesar 16,70 persen pada tahun 2022.

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan Covid-19 sudah banyak memberikan peningkatan terhadap berbagai aktifitas dan distribusi hasil ekonomi di semua sektor di Kabupaten Blora. Pada tahun 2022, ekspor tumbuh 2,02 persen dan impor tumbuh 6,46 persen. Share ekspor migas di Blora mendominasi dari total ekspor yaitu sekitar 30 persen dari total ekspor. Produksi migas tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini berdampak pada total ekspor tahun 2022 mengalami penurunan, sehingga net eksportnya menjadi negatif.

# TABEL LAMPIRAN

<https://blorakab.bps.go.id>

Tabel 1 : PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	15.640.901,35	16.894.337,06	16.904.412,81	17.725.892,80	19.521.811,85
2. Konsumsi LNPRT	336.733,62	379.035,97	374.924,70	392.800,03	437.547,40
3. Konsumsi Pemerintah	2.185.489,10	2.254.739,47	2.155.491,10	2.206.707,81	2.229.048,39
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.762.773,97	3.037.220,17	2.815.616,79	3.128.621,31	3.493.491,51
5. Perubahan Inventori	119.770,86	94.810,51	100.838,31	96.382,99	114.136,33
6. Ekspor Neto	3.585.874,60	3.305.794,29	1.652.926,35	3.378.203,53	5.172.858,83
<b>PDRB</b>	<b>24.631.543,50</b>	<b>25.965.937,47</b>	<b>24.004.210,06</b>	<b>26.928.608,47</b>	<b>30.968.894,31</b>

Ket :

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 2 : PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.214.505,65	11.805.332,09	11.662.766,36	11.950.308,09	12.583.584,85
2. Konsumsi LNPRT	217.599,32	239.054,61	232.796,15	235.881,85	245.977,59
3. Konsumsi Pemerintah	1.411.871,52	1.445.191,69	1.386.873,52	1.385.958,29	1.391.224,93
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.976.211,59	2.090.856,51	1.936.724,39	2.124.442,69	2.273.466,44
5. Perubahan Inventori	55.758,97	59.201,36	104.724,66	73.700,95	85.006,68
6. Ekspor Neto	2.729.268,95	2.678.778,88	2.160.001,66	2.356.155,03	2.033.158,79
<b>PDRB</b>	<b>17.605.216,00</b>	<b>18.318.415,14</b>	<b>17.483.886,74</b>	<b>18.126.446,90</b>	<b>18.612.419,28</b>

Ket :

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 3 : Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	63,50	65,06	70,42	65,83	63,04
2. Konsumsi LNPRT	1,37	1,46	1,56	1,46	1,41
3. Konsumsi Pemerintah	8,87	8,68	8,98	8,19	7,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,22	11,70	11,73	11,62	11,28
5. Perubahan Inventori	0,49	0,37	0,42	0,36	0,37
6. Ekspor Neto	14,56	12,73	6,89	12,55	16,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 4 : Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018-2022 (Persen)

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Konsumsi Rumah Tangga	63,70	64,45	66,71	65,93	67,61
2. Konsumsi LNPRT	1,24	1,30	1,33	1,30	1,32
3. Konsumsi Pemerintah	8,02	7,89	7,93	7,65	7,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,23	11,41	11,08	11,72	12,21
5. Perubahan Inventori	0,32	0,32	0,60	0,41	0,46
6. Ekspor Neto	15,50	14,62	12,35	13,00	10,92
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket :

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2018-2022 (Persen)

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,90	5,27	-1,21	2,47	5,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,99	9,86	-2,62	1,33	4,28
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,94	2,36	-4,04	-0,07	0,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,72	5,80	-7,37	9,69	7,01
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>4,38</b>	<b>4,05</b>	<b>-4,56</b>	<b>3,68</b>	<b>2,68</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Tabel 6. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	139,47	143,11	144,94	148,33	155,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	154,75	158,56	161,05	166,52	177,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	154,79	156,02	155,42	159,22	160,22
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,80	145,26	145,38	147,27	153,66
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>139,91</b>	<b>141,75</b>	<b>137,29</b>	<b>148,56</b>	<b>166,39</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Pertumbuhan Implisit PDRB Kabupaten Blora  
Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>	<b>2022**</b>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,86	2,61	1,28	2,34	4,59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,86	2,46	1,57	3,40	6,82
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,57	0,79	-0,38	2,44	0,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,03	3,91	0,08	1,30	4,34
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Neto	-	-	-	-	-
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>7,92</b>	<b>1,31</b>	<b>-3,10</b>	<b>8,29</b>	<b>12,00</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara





# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

<https://blorakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**

Jl. Rajawali No, 12, Blora, 58211

Telp (0296) 5311911

Homepage : [blorakab.bps.go.id](http://blorakab.bps.go.id), Email : [bps3316@bps.go.id](mailto:bps3316@bps.go.id)